



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Farhan Fatnanto
2. Jabatan : KEPALA KPPN SEMARANG I
3. NHK : 136405

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.665.533.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/50 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 421.455.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/150 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 644.091.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m²/100 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 532.665.000
4. Tanah Seluas 912 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 67.322.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOBIL, Wuling Confero S 1.5L Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.990.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 63.495.928**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.943.018.928

III. HUTANG Rp. 106.166.139**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.836.852.789



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.